

Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Kinerja Organisasi pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Humaida Ferril Yuliana¹, I Dewa Ketut Widana², Sri Yanti Yosepha³

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Maju, Indonesia²

Program Studi Manajemen, Universitas Nusantara Mandiri, Indonesia³

yulianahumaida@gmail.com¹, dkwidana@unsurya.ac.id², sriy@unsurya.ac.id³

Kata Kunci:

Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP),
kinerja organisasi,
akuntabilitas, sektor
publik, tata kelola
pemerintahan yang baik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap kinerja organisasi pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Data dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara penerapan SAKIP dengan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Semakin baik penerapan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, dan akuntabilitas capaian kinerja, maka semakin meningkat pula kualitas pelayanan publik dan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, penguatan implementasi SAKIP sangat penting untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kinerja institusi pemerintah.

Abstract

Keyword:
Government Agency
Performance
Accountability System
(SAKIP), organizational
performance,
accountability, public
sector, good governance

This study aims to analyze the effect of the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) on organizational performance in the South Tangerang City Government. The implementation of SAKIP is expected to improve effectiveness, efficiency, transparency, and accountability in public sector governance. This research uses a quantitative approach with data collected through questionnaires distributed to employees within the South Tangerang City Government agencies. The data were analyzed using statistical methods to determine the relationship and influence between the implementation of SAKIP and organizational performance. The results of the study indicate that the implementation of the Government Agency Performance Accountability System has a positive and significant effect on organizational performance. Better implementation of planning, performance measurement, reporting, evaluation, and performance achievement accountability contributes to improving the quality of public services and organizational effectiveness. Therefore, strengthening the implementation of SAKIP is essential to support the achievement of good governance and improve government institutional performance.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerja instansi pemerintah secara terstruktur dan berkesinambungan. Salah satu sistem yang diterapkan pemerintah adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran negara. SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui penerapan SAKIP, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun target kinerja yang jelas, melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada publik.

Penerapan SAKIP menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan adanya sistem ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan SAKIP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas. Salah satu pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sebagai daerah otonom yang mengalami perkembangan pesat, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Dalam implementasinya, penerapan SAKIP pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya penyusunan indikator kinerja, kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami sistem pengukuran kinerja. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas penerapan SAKIP dan berdampak pada kinerja organisasi pemerintah daerah.

Kinerja organisasi merupakan gambaran tingkat pencapaian tujuan organisasi yang ditentukan berdasarkan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi pemerintah dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan program, kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan anggaran, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Semakin baik penerapan SAKIP, maka diharapkan semakin baik pula kinerja organisasi pemerintah daerah.

Penelitian mengenai pengaruh penerapan SAKIP terhadap kinerja organisasi menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dan memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kondisi kinerja organisasi pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan SAKIP terhadap kinerja organisasi. Penelitian ini dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada OPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang terlibat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi SAKIP.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, dengan kriteria responden meliputi pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, memahami penerapan SAKIP, serta telah bekerja minimal satu tahun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan penerapan SAKIP pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sedangkan wawancara dilakukan kepada pegawai atau pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai penerapan SAKIP dan kinerja organisasi. Selanjutnya, kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer dari responden mengenai penerapan SAKIP dan kinerja organisasi dengan menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Banten yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi. Deskripsi Hasil Penelitian:

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada responden, diketahui bahwa penerapan SAKIP pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara umum telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya perencanaan kinerja yang jelas, penyusunan indikator kinerja, pelaporan kinerja secara berkala, serta pelaksanaan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan.

Beberapa indikator penerapan SAKIP menunjukkan hasil yang baik, terutama dalam aspek penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan pengukuran capaian program kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurang optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan pemahaman pegawai terhadap sistem pengukuran kinerja berbasis hasil.

Kinerja Organisasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan berada pada kategori baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya efektivitas pelaksanaan program kerja, kualitas pelayanan publik, serta pencapaian target organisasi yang telah ditetapkan.

Kinerja organisasi juga terlihat dari meningkatnya koordinasi antarbagian dalam pelaksanaan program kerja serta meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya pencapaian target kinerja. Selain itu, penerapan evaluasi kinerja secara berkala membantu organisasi dalam mengidentifikasi hambatan dan melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam peningkatan kinerja organisasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja.

Pengaruh Penerapan SAKIP terhadap Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan regresi linear sederhana, diperoleh hasil bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1. Teknik Analisis Data Penelitian

No	Analisis	Rumus	Fungsi
1	Regresi Linear	$Y = a + bX$	Mengetahui pengaruh SAKIP terhadap kinerja organisasi
2	Uji t	$t = r\sqrt{(n-2) / \sqrt{(1-r^2)}}$	Menguji signifikansi pengaruh SAKIP
3	Koefisien Determinasi	$KD = r^2 \times 100\%$	Mengetahui besar kontribusi SAKIP
4	Korelasi	$r = (n\sum XY - \sum X \sum Y) / \sqrt{[(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)]}$	Mengetahui hubungan SAKIP dan kinerja organisasi

Simbol	Arti
X	Penerapan SAKIP
Y	Kinerja Organisasi
a	Konstanta
b	Koefisien Pengaruh
r	Nilai Korelasi
KD	Koefisien Determinasi
n	Jumlah Responden

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAKIP, maka semakin baik pula kinerja organisasi yang dihasilkan. Penerapan SAKIP menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan karena sistem ini mengarahkan organisasi untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang terstruktur, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih fokus dalam mencapai sasaran organisasi dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program secara terukur.

Penerapan SAKIP membantu organisasi dalam menetapkan tujuan, indikator kinerja, serta target

capaian yang jelas dan terukur. Kejelasan tersebut dapat memberikan arah bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga kegiatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga pada pencapaian hasil yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala memungkinkan organisasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan setiap program dan kegiatan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara target dan realisasi, organisasi dapat segera melakukan identifikasi terhadap permasalahan serta mengambil langkah perbaikan. Dengan demikian, SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen manajemen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi.

Pengaruh positif dan signifikan penerapan SAKIP terhadap kinerja organisasi juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kerja organisasi publik. Ketika setiap program dan kegiatan disusun berdasarkan perencanaan yang jelas, disertai indikator dan target yang terukur, organisasi akan memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengevaluasi pencapaian kinerjanya. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong pegawai untuk bekerja secara lebih terarah, efektif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan SAKIP yang dilakukan secara konsisten dapat menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada hasil serta meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pencapaian kinerja organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori good governance yang menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan SAKIP dapat menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip good governance karena melalui sistem tersebut pemerintah dituntut untuk menyusun perencanaan, melaksanakan program, melakukan pengukuran, serta mempertanggungjawabkan hasil kinerja secara sistematis. Semakin baik prinsip-prinsip akuntabilitas diterapkan dalam organisasi pemerintahan, maka semakin besar pula peluang terciptanya pengelolaan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks Pemerintah Kota Tangerang Selatan, penerapan SAKIP dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja.

Selain mendukung teori good governance, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori akuntabilitas publik yang menjelaskan bahwa instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, pencapaian kinerja, serta penggunaan sumber daya dan anggaran kepada masyarakat. Pemerintah sebagai organisasi publik tidak hanya dituntut untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan, tetapi juga harus mampu menunjukkan hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut. Melalui penerapan SAKIP, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Setiap program dan kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sehingga penggunaan sumber daya pemerintah dapat lebih mudah dipantau dan dievaluasi.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapan SAKIP. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman sebagian pegawai terhadap indikator kinerja, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi antara proses perencanaan dan penganggaran. Kurangnya pemahaman terhadap indikator kinerja dapat menyebabkan adanya perbedaan pemaknaan terhadap target yang harus dicapai, sehingga pengukuran kinerja belum sepenuhnya mencerminkan hasil yang sebenarnya. Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia dapat memengaruhi kemampuan organisasi dalam menyusun perencanaan, melakukan pengukuran, mengolah data, serta mengevaluasi kinerja secara optimal. Permasalahan integrasi antara perencanaan dan penganggaran juga dapat menyebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis mengenai perencanaan dan pengelolaan kinerja organisasi. Peningkatan kompetensi pegawai diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai penyusunan indikator kinerja, penetapan target, pengukuran capaian, serta pelaksanaan evaluasi kinerja. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja sehingga seluruh sumber daya yang digunakan benar-benar diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi.

Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu ditingkatkan dalam mendukung penerapan SAKIP. Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan data kinerja dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi kinerja secara lebih cepat dan akurat. Dengan tersedianya data kinerja yang terintegrasi, proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Teknologi informasi juga dapat membantu pimpinan dalam memperoleh informasi

mengenai perkembangan capaian kinerja sehingga pengambilan keputusan dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secara lebih tepat waktu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKIP pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Pengaruh positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa SAKIP memiliki peran penting dalam mendorong organisasi pemerintah untuk bekerja secara lebih terarah, terukur, efektif, dan bertanggung jawab. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, optimalisasi penerapan SAKIP melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Pada akhirnya, peningkatan kinerja tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada pencapaian target organisasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tangerang Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap kinerja organisasi pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAKIP secara umum telah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja secara berkala. Kinerja organisasi pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga berada dalam kategori baik, yang tercermin dari peningkatan efektivitas kerja, kualitas pelayanan publik, serta pencapaian target program dan kegiatan organisasi. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penerapan SAKIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, sehingga semakin baik penerapan SAKIP, maka semakin baik pula kinerja organisasi pemerintah daerah. Penerapan SAKIP juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian local government's accountability and performance: The isomorphism institutional perspective. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/jai.190187>
- Akbar, R., Pilcher, R. A., & Perrin, B. (2015). Implementing performance measurement systems: Indonesian local government under pressure. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 12(1), 3–33. <https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2013-0013>
- Dwiyanto, Agus. 2018. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Julnes, P. D., & Holzer, M. (2001). Promoting the utilization of performance measures in public organizations: An empirical study of factors affecting adoption and implementation. *Public Administration Review*, 61(6), 693–708. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00140>
- Kurniawan, F., & Akbar, R. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*. <https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59254>
- Nurkholilah, D., Augustinah, F., Albab, U., & Kamariyah, S. (2025). The Effectiveness of the Implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) in the East Java Provincial Government. *Journal of Studies in Academic, Humanities, Research, and Innovation*. <https://doi.org/10.71305/sahri.v2i1.260>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sedarmayanti. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Sofyan, & Rahmawati, N. F. (2024). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*. <https://doi.org/10.31334/neraca.v6i2.4660>
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunah, A. A., & Yudartha, I. P. D. (2025). Accountability as Governance: Negotiating Performance, Power, and Bureaucratic Culture through SAKIP in Bali. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.30598/populis.20.1.30-46>

Syafirman, & Syamsir. (2024). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja ASN di Dinas Dukcapil Padang Pariaman. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*. <https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.223>